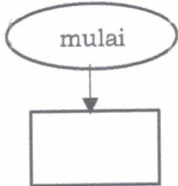
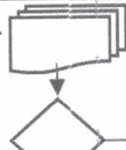
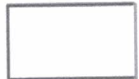
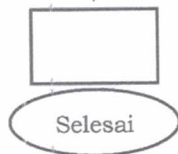


 PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI SEKRETARIAT DPRD BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Nomor SOP : DK.08.04/1517-TAHUN 2024 Tanggal Pembuatan : 24 September 2024 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 24 September 2024 Disahkan oleh : Plt. SEKRETARIS DPRD KAB. BEKASI,  H. E. YUSUP TAUPIK, S.SiT., MM. MT. Pembina Tingkat I NIP 19750402 199703 1 005 Judul SOP : SOP PENGELOLAAN JDIIH DPRD KABUPATEN BEKASI
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 4. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	Kualifikasi Pelaksana: - Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana. - Menguasai pengolahan aplikasi berbasis web. - Menguasai aplikasi komputer penunjang perkantoran. - Mengetahui peraturan perundang-undangan termasuk produk hukum daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. 10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	- Dokumen Peraturan Perundang-undangan - Dokumen Produk Hukum Daerah - Perlengkapan kantor dan alat tulis kantor - Jaringan Internet

No.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		Bidang Koleksi Hukum dan Teknis Pengelolaan Dokumen Hukum	Koordinator	Bidang Promosi JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Penerimaan Dokumen				- dokumen produk hukum dan perundang-undangan. - dokumen terkait JDIH lainnya	30 '	Tersedianya dokumen hukum dan perundang-undangan serta dokumen terkait JDIH lainnya.	
2	Mengidentifikasi dan memeriksa dokumen sesuai jenisnya				- dokumen produk hukum dan perundang-undangan. - dokumen terkait JDIH lainnya	60 "	Tertatanya dokumen hukum dan perundang-undangan serta dokumen terkait JDIH lainnya.	
3	Mengolah dokumen untuk diinput ke dalam database JDIH					60 "	Dokumen yang siap diinput	
4	Upload dokumen ke website JDIH					60 "	Publikasi dokumen hukum dan perundang-undangan serta dokumen terkait JDIH lainnya.	